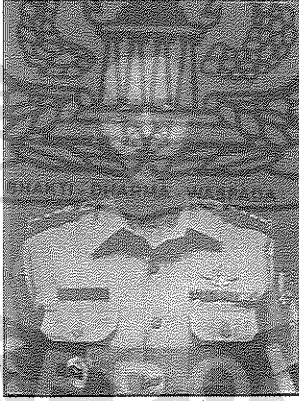


STATUS DAN KEDUDUKAN POLRI DALAM ERA REFORMASI

Oleh : Kol. Pol. Drs. H.I.B. Nawawi Ranio SH

Memasuki era reformasi dewasa ini merupakan peluang bagi Polri untuk meluruskan kembali status dan kedudukan Polri yang sudah salah kaprah pada era Orde Baru yang lalu dengan mengambil langkah-langkah agar juga tidak tertinggal dari yang lainnya, pada reformasi hukum ini masih ada anggapan atau kenyataan Polri terutama di bidang penyelidikan dan penyidikan terkesan "Lamban", sehingga banyak hal-hal yang seharusnya ditangani Polri jadi berpindah pada instansi lain dengan berbagai dalih antara lain; tidak mau mengambil resiko yang lebih parah; represif untuk preventif, ...demi keamanan; demi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa; demi menjaga stabilitas nasional; demi menjaga kewibawaan pemerintah; ... menciptakan situasi kondusif dan lain sebagainya. Termasuk adanya anggapan bahwa Polri belum mampu

baik dipandang dari kualitas maupun kuantitas dari personil, sarana prasarana belum mendukung, dsamping dukungan anggaran yang belum memadai. Dengan demikian masyarakat pun banyak melaporkan permasalahan yang dialaminya ke Kodim atau ke Koramil yang dianggap lebih tanggap dan cepat bertindak walaupun diluar ketentuan hukum.



Bila dilihat dari sistem dan metode tindakan tersebut dianggap bahwa didalam UU No. 20 Th. 1982 tentang Hankamneg Ps. 30 (4) a. disebutkan bahwa "Polri sebagai alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan

hankamneg lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan Kamtibmas." Pasal inilah yang dijadikan dasar untuk membenarkan

segala tindakan untuk mengambil alih tugas dan wewenang Kepolisian termasuk tugas pengamanan VIP/VVIP dan Patroli kota dan lain-lain yang apabila beresiko hukum Polri harus menerima beban akibatnya.

Banyak tindakan-tindakan yang kalau dilihat dari segi hukum terutama KUHAP an muncul undang-undang lain yang bertentangan dengan KUHAP itu sendiri. Mengapa hal ini banyak terjadi terutama pada masa Orde Baru, tentunya kita tidak ingin saling menyalahkan, namun bagi Polri perlu introspeksi diri, sudah sampai dimana kemampuan dan profesionalisme Polri dalam mengemban tugasnya agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak dapat dijangkau atau diambil alih oleh pihak lain diluar kewenangannya sendiri sesuai aturan yang ada, terutama memenuhi tuntutan reformasi hukum dan menuju Polri mandiri dengan tujuan meluruskan kembali status dan kedudukan Polri yang sudah salah kaprah pada era Orde Baru yang lalu.

Kalau kita menyimak kata-kata Jenderal TNI (purn) Rudini mantan Kasad dan Mendagri yang sekarang menjabat Ketua Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI) dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Pusat Studi Kepolisian bersama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berlangsung tanggal 22 dan 23 Oktober 1998 dan dibuka oleh Wakapolri Letjen Pol. Drs. Nana S. Permana; dengan Thema "Polisi Indonesia III", di Hotel Patra Jasa Semarang, beliau mengatakan "YANG PENTING POLRI HARUS DIJAUHKAN DARI SIFAT-SIFAT

MILITER YANG KERAS DAN DIKEMBALIKAN KE SIFAT-SIFAT SIPIL YANG DAPAT MEMBERIKAN KEPADA MASYARAKAT SUATU SUASANA KEHIDUPAN YANG TEDUH, AMAN, TENTERAM DAN TERTIB".

Hal ini dirasakan oleh masyarakat akan adanya tindakan kekerasan oleh Polri yang bertentangan dengan HAM. Rudini yang mantan Kasad mengatakan, kita harus berani mengakui selama berlangsungnya Orde Baru, negara kita ini semakin bergeser ke NEGARA KEKUASAAN, sehingga melahirkan perlawanan rakyat yang semakin meningkat dan puncaknya adalah pada gerakan reformasi. Polri seperti aparat lainnya telah terperosok dalam format politik Orba untuk melanggengkan kekuasaan dan dengan pengintegrasian Polri didalam ABRI yang berlawanan fungsi (fungsi damai versus fungsi perang) menimbulkan ekses bagi Polri yang kehilangan warna yang diganti dengan warna militer. Polri tidak lagi lembut dan dinilai semakin menjauhi rakyat yang mendambakan kehidupan demokratis.

Integrasi ABRI memang mahal dan keuntungannya ada kesamaan dalam level terutama kepangkatan sehingga menimbulkan ras Korps yang dapat mengurangi volume perkelaian antar anggota ABRI terutama pada tingkat Perwira yang tidak mudah dihasut dan diadu domba oleh pihak lain yang memanfaatkan Chauvinis Angkatan seperti terjadi pada masa sebelum integrasi. Kerugiannya menurut Rudini, karena integrasi

disalahartikan menjadi penyeragaman, yang telah terjadi penyeragaman hampir di semua bidang, padahal fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan berbeda antara satu matra dengan matra lainnya. Penyeragaman memang menguntungkan untuk menumbuhkan jiwa korsa, namun merugikan Profesionalisme ABRI baik militer maupun Polri. Kemunduran tersebut menjadi semakin parah manakala ABRI semakin berbicara masalah sosial politik, yang dikaitkan dengan kepentingan kekuasaan. Akibatnya ABRI termasuk Polri semakin dijauhi rakyat dan semakin pudar predikatnya sebagai pelindung dan pembela rakyat, bahkan keperpihakannya kepada rakyat semakin kurang dirasakan. ABRI terlihat dan dirasakan oleh rakyat lebih berpihak kepada penguasa, baik penguasa di bidang Pemerintahan maupun penguasa dibidang ekonomi (pengusaha) yang lebih dikenal sebagai konglomerat.

Menurut Rudini yang juga mantan Mendagri sebagai bukti kemunduran profesi ABRI adalah penanganan peristiwa akhir-akhir ini dalam kaitannya dengan gerakan reormasi dimana ABRI tidak bisa menguasai keadaan, bahkan terkesan telah terjadi kekisruhan komando, karena tumpang tindih nya fungsi Polisi dan Militer dalam penyelesaian masalah yang diakibatkan unjuk rasa. Terjadinya kasus-kasus mencari kambing hitam dan pengingkaran tanggung jawab, yang mengesankan ABRI tidak kompak, disebutkan seperti:

**S E S U D A H
W E W E N A N G N Y A
D I R A M P A S, P O L I S I
D I S U R U H M E N E R I M A
B E B A N D O S A yang ternyata
D I L A K U K A N M I L I T E R**

"Kasus Marsinah dan kasus orang hilang adalah contoh dari tumpang tindihnya fungsi-fungsi Polisi dan Militer. SESUDAH WEWENANGNYA DIRAMPAS, POLISI DISURUH MENERIMA BEBAN DOSA yang ternyata DILAKUKAN MILITER", katanya. Rudini juga menyampaikan kelemahan-kelemahan Polisi karena kurangnya kemampuan untuk menyidik, terutama dibidang yuridis. "Idealnya seorang penyidik polisi, kemampuannya sama dengan Penuntut Umum (Jaksa) yang pada dasarnya adalah Sarjana Hukum, oleh karena itu persyaratan SLTA untuk menjadi polisi harus ditinjau kembali dan pendidikannya harus ditata kembali", katanya.

Dari makalah bahan pada seminar tersebut, Rudini menyimpulkan bahwa Polri memang lebih baik dan bahkan seharusnya berada diluar ABRI yang ideal berada langsung dibawah Predisiden, pembinaan dibawah Mabes Polri sedangkan operasionalnya bersifat otonom dan didesentralisasikan di daerah-daerah dengan status BKO atau bawah komando KDH I dan KDH II. Dapat

juga bernaung di lingkungan Depdagri atau Dep. Kehakiman tetapi tetap harus mandiri. Dari cuplikan makalah Jenderal TNI (Purn) Rudini sebagai Ketua LPSI pada seminar nasional tersebut dapat kita ambil intinya antara lain :

- Rudini sebagai mantan KSAD tahu persis bahwa selama ini Polri dengan masuknya kedalam integrasi ABRI untuk dijadikan disamping sebagai alat kekuasaan juga dijadikan BEMPER untuk dikorbankan bila ada tindakan yang salah dari militer, termasuk rekayasa kasus penempakan Mahasiswa Trisakti dengan mengorbankan anggota Brimob sebagai pelaku penempakan yang dengan gigihnya Buyung Nasution membela tersangka, maka dialihkan pada kesalahan prosedur, bukan penempakan.

- Dapatlah dipahami kasus-kasus yang lain seperti kasus Marsinah secara blak-blakan beliau mengungkapkan Polisi disuruh MENERIMA BEBAN DOSA yang ternyata DILAKUKAN MILITER, belum kasus-kasus yang lain yang identik dengan kasus-kasus tersebut.

Semoga dengan kebijaksanaan Pemerintah yang akan datang dimana tuntutan reformasi dapat menempatkan status dan kedudukan Polri yang tepat sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Namun integrasi Polri kedalam ABRI tidak hanya dilihat pada segi negatifnya saja, masih banyak segi positif yang perlu kita kaji, karena dengan adanya pendidikan Militer pada Polri dapat menumbuhkan

Yang terpenting adalah **KEMANDIRIAN HAK OTONOM** Polri dibidang KAMTIBMAS betul-betul diberikan pada Polri **TANPA** keikutsertaan apalagi menentukan arah penyidikan pada penyimpangan hukum yang berlaku, semua harus berjalan menurut peraturan dan perundang-undangan yang ada dan patut dipatuhi oleh setiap warga negara tanpa pandang bulu.

disamping jiwa korsa juga espi de corps yang kuat, disiplin, keberanian menghadapi tantangan, jiwa dan semangat juang yang tinggi juga mudah mengkoordinir kekuatan, sehingga masih perlu diteruskan, walaupun sifat keras dan kejam serta arogan harus dikikis habis dari sifat-sifat anggota Polri sebagai pelindung, pengayom, pengamanan dan pembimbing masyarakat.

Yang terpenting adalah **KEMANDIRIAN HAK OTONOM** Polri dibidang KAMTIBMAS betul-betul diberikan pada Polri **TANPA** keikutsertaan apalagi menentukan arah penyidikan pada penyimpangan hukum yang berlaku, semua harus berjalan menurut peraturan dan perundang-undangan yang ada dan patut dipatuhi oleh setiap warga negara tanpa pandang bulu.

Disusun oleh Drss. H. IB. Nawawi Ranio, SH.